

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Pantai Toronipa

Pantai toronipa adalah kawasan destinasi wisata yang sangat populer di Sulawesi Tenggara yang saat ini sedang dikembangkan dan dibangun dengan akses yang strategis oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai kawasan wisata bahari. Secara administrasi pantai toronipa terletak di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (SULTRA).

Secara geografis Pantai Toronipa terletak $122^{\circ} 23'$ - $122^{\circ} 39'$ bujur timur dan $03^{\circ} 54'30''$ - $04^{\circ} 03'11''$ lintang selatan yang berbatasan langsung dengan perairan laut Banda. Berdasarkan sudut pandang geografis, Pantai Toronipa terletak diujung timur Kabupaten Konawe dan memiliki hamparan pasir putih sekitar kurang lebih 4 km. sepanjang pesisir pantai dan daratannya berbatasan langsung dengan perairan laut banda, secara detail batas-batas lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan langsung dengan garis pantai
- Sebelah selatan berbatasan langsung dengan pesisir laut pantai perairan bintang samudra
- Sebelah barat berbatasan dengan desa soropia kcamatan soropia
- Sebelah utara berbatasan dengan desa bokori dan pulau bokori

Pantai toronipa juga berjarak sekitar kurang lebih 20 km dari kota Kendari sehingga dapat diakses melalui jalur transportasi darat maupun laut.

Hal ini juga didukung dengan adanya akses infrastruktur yang mempunyai berupa jalan beton dengan kapasitas jalur dua, sehingga dapat mempermudah wisatawan untuk menempuh akses yang sudah divasilitasi oleh pemerintah untuk berkunjung dan berwisata dipantai toronipa.

4.1.2 Sejarah Toronipa

Pantai Toronipa berasal dari bahasa Bugis yaitu “Toro” yang berarti turun dan “Nipa” yang berarti pohon nipa. Jadi, toronipa artinya adalah pohon nipa yang turun. Istilah toronipa diambil dari semenjak orang tua dulu mendiami wilayah tersebut, yang dimana pada saat itu wilayah pesisir pantai toronipa masih banyak di temui pohon nipa. Sampai saat ini bahkan masih banyak kita temui pohon nipa yang tumbuh di sekitaran gerbang pantai toronipa, namun semenjak pantai toronipa dibuka sebagai kawasan pariwisata, pohon nipa sudah jarang untuk kita saksikan karena area pesisir pantai sudah dibuka dan ditata sebagai area kawasan pariwisata.

Selain dari pada itu, ada juga beberapa pendapat lain dari masyarakat lokal setempat (tokoh masyarakat yang tinggal disekitaran pantai toronipa), ia mengatakan bahwa pantai toronipa memang berasal dari bahasa bugis. namun jika dikaji secara makna kata dari toronipa yaitu brarti iku-ikut, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat toronipa:

“Toronipa itu berasal dari bahasa bugis, toro artinya iku-ikut atau sambung-sambung sementara nipa itu artinya pohon nipa. Disini itu kalau ada satu kejadian misalnya ada satu orang yang menikah pasti besok-besoknya ada lagi orang yang ikut untuk menikah, samaji klau ada yang meninggal pasti begitu juga, itumi kenapa toro itu diartin sebagai ikut-ikut atau sambung-sambung”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu tokoh masyarakat di kelurahan toronipa atas nama Bapak Satir, Ia

menerangkan makna kata dari Toronipa itu sendiri, Beliau menerangkan berdasarkan latar belakang dari kebiasaan maupun fenomena yang sering terjadi di Daerah tersebut, bahwa jika ada satu kejadian entah itu kesanya bahagia maupun duka pasti akan sambung menyambung atau terus-terusan akan berderet dengan kejadian selanjutnya. Adapula pendapat yang berbeda mengenai makna kata toronipa yaitu pendapat dari bapak Lutping (Mantan Ketua Karang Tarauna Kelurahan Toronipa Tahun 1990):

“Sejauh yang saya alami dan saya pelajari kata toronipa terbagi menjadi dua kata yaitu Toro yang artinya hidup dan Nipa berarti pohon nipa, jadi maknanya juga ada dua yakni pohon nipa yang hidup dan tempat hidup pohon nipa, sebenarnya juga disana lebih banyak pohon kelapa hanya saja terhalang oleh lebatnya pohon nipa makanya makanya nama pohon nipa ini yang diambil sebagai lambang pantai toronipa ini”.

Sejarah terbentuknya pantai toronipa sebenarnya pertama kali dibuka oleh beberapa masyarakat lokal yang tinggal disekitaran pantai Toronipa, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Lutping beliau mengatakan Bahwa:

Pantai ini pertama kali rencananya akan dibuka itu pada tahun 1993, kebetulan saya sebagai salah satu pelopor yang menyuarakanya untuk dibuka adanya wisata pantai toronipa ini, bersama dengan 8 orang warga lain, dulu itu saya dan teman-teman suka dibilangi gila sama warga sini, karena menurut mereka tidak mungkin tempat seperti ini lokasinya yang masih hutan-hutan mau dijadikan tempat wisata yang rame, tapi tidak masalah karena saya ingat pesan orang tua saya, kalau pekerjaan yang ada tantanganya Insyallah pasti berhasil. Dulu supaya ada daya tarik untuk pengunjung, saya buat stiker baru saya kasi teman-teman dan mereka sebarkan lagi sebagai bentuk promosi pada waktu itu, dan Alhamdulillah saat ini ekspetasi saya itu terwujud”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah dibukanya pariwisata pantai toronipa itu berawal dari inisiatif masyarakat lokal setempat, karena melihat dari kondisi geografis pesisir pantai nya memiliki panorama yang sanga eksotis, sehingga memiliki potensi pariwisata

yang indah untuk dikunjungi. Samapi saat ini juga pantai toronipa mulai dikenal oleh khalayak umum khususnya para wisatawan lokal yang ingin berkunjung dipantai toronipa untuk menikmati keindahanya dan selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan.

4.1.4 Kondisi Masyarakat Lokal Kelurahan Toronipa

Masyarakat lokal adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda dari masyarakat umum. Masyarakat lokal sering kali memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan mereka dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Masyaerakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarakan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku secara umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya alam yang ada disekitarnya melainkan saling membutuhkan satu sama lain dengan melakukan aktifitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas, masyarakat lokal yang dimaksud dalam hasil penelitian ini yakni, masyarakat lokal yang berada dikelurahan toronipa Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Yang secara strategis masuk dalam kawasan pariwisata yang menjadi salah satu ikon bagi masyarakat lokal setempat sehingga dapat mengakomodasi dan mengembangkan potensi pariwisata Pantai Toronipa.

Toronipa merupakan kawasan pariwisata yang terletak di kelurahan Toronipa, kecamatan soropia, kabupaten Konawe. Secara statistik toronipa

memiliki jumlah penduduk sebanyak 221 KK, dengan jumlah penduduk sekitar 653 jiwa berdasarkan data tahun 2023.

Berdasarkan letak geografis, toronipa merupakan daerah pesisir pantai maka tentu mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian dengan memanfaatkan potensi dari hasil laut Sebagai nelayan. Selain dari pada itu, karena toronipa masuk dalam kawasan pariwisata maka masyarakat lokal memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber pendapatan berupa pemanfaatan lahan sebagai kawasan pariwisata dengan menyediakan sarana maupun prasarana bagi wisatawan yang dapat bernilai ekonomis.

Masyarakat toronipa kebanyakan di huni oleh mayoritas suku Bugis dan suku Bajo yang beraga Islam. Sesuai dengan letak geografis nya daerah toronipa merupakan daerah pesisir, sehingga wilayah ini dimanfaatkan sesuai dengan kebiasaan masyarakat suku bugis dan suku bajo yang dimana suku tersebut dikenal dengan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan khususnya daerah pesisir pantai. Namun Masyarakat suku bugis lebih dominan datang diwilayah toronipa dengan tujuan untuk berdagang dan meningkatkan potensi usaha dalam bidang bisnis dan komersial, sementara masyarakat bajo mendiami pesisir pantai toronipa dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi laut dengan bekerja sebagai nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah stau responend yang merupakan salah satu tokoh masyarakat toronipa, beliau juga merupakan mantan lurah di kelurahan toronipa atas nama **Daeng Jawahiruddin Abu Haseng** beliau mengatakan bahwa:

“Untuk kondisi masyarakat di toronipa ini itu, menyesuaikan dengan sejarah awal mulanya penduduk yang pertama kali menghuni kawasan ini, ya tentu pertama kali yang menduduki kawasan ini yaitu kebanyakan dari suku bugis pada saat itu. yang dimana, dulunya itu kawasan ini hanyalah hutan yang dipenuhi dengan pohon nipa setelah beberapa orang yang mendiami kawasan ini, kemudian tinggal dan beranak pinak sehingga sampai saat ini sudah membentuk satu kelompok dan populasi masyarakat yang mendiami kawasan ini, setelah beberapa saat kemudian ada juga beberapa masyarakat luar/pendatang yang tinggal dan berdomisili di kelurahan toronipa ini.

Pernyataan yang serupa juga telah di sampaikan oleh **Bapak Rusdi** sebagai Informan melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti beliau mengatakan bahwa:

“Masyarakat toronipa ini, sudah dari awal-awalnya yang mendiami kawasan ini itu rata-rata berasal masyarakat suku bugis, kalau untuk suku bajo itu mereka bagian-bagian daerah Bokori sana hanya memang ada beberapa yang tinggal disini, masyarakat bugis yang mendiami kawasan sini itu awalnya memang untuk merantau mencari kehidupan sesuai dengan tradisi/kebiasaan suku bugis pada umumnya”.

Seiring berjalanya waktu, ketika wilayah toronipa dikenal oleh banyak masyarakat luar dan memiliki potensi wisata yang indah berupa hamparan pasir putih yang sangat eksotis dan memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh wisatawan, seketika itu juga masyarakat lokal yang tinggal di wilayah pesisir pantai toronipa tidak lagi menfokuskan mata pencaharian mereka sebagai nelayan, melainkan mereka lebih memilih memanfaatkan potensi pariwisata pantai toronipa dengan mengakomodasi peluang secara ekonomis sebagai sumber pendapatan individu maupun rumah tangga. mereka memanfaatkan lahan yang didiaminya dengan menyediakan fasilitas wisata berupa sarana maupun pra sarana yang berpeluang secara ekonomis yang hendak di butuhkan oleh banyak wisatawan.

4.2 System Tata Kelola Pantai Toronipa

System tata kelola merupakan proses interaksiss melalui aturan/hukum yang berlaku baik secara norma maupun kebiasaan masyarakat yang dilalukan secara turun temurung. Hal ini biasa dilakukan dalam suatu perusahaan atau pemerintahan di suatu daerah agar terciptanya ketertiban umum dan terorganisir secara sistematis dan tidak menimbulkan ketimpangan sosial di suatu masyarakat.

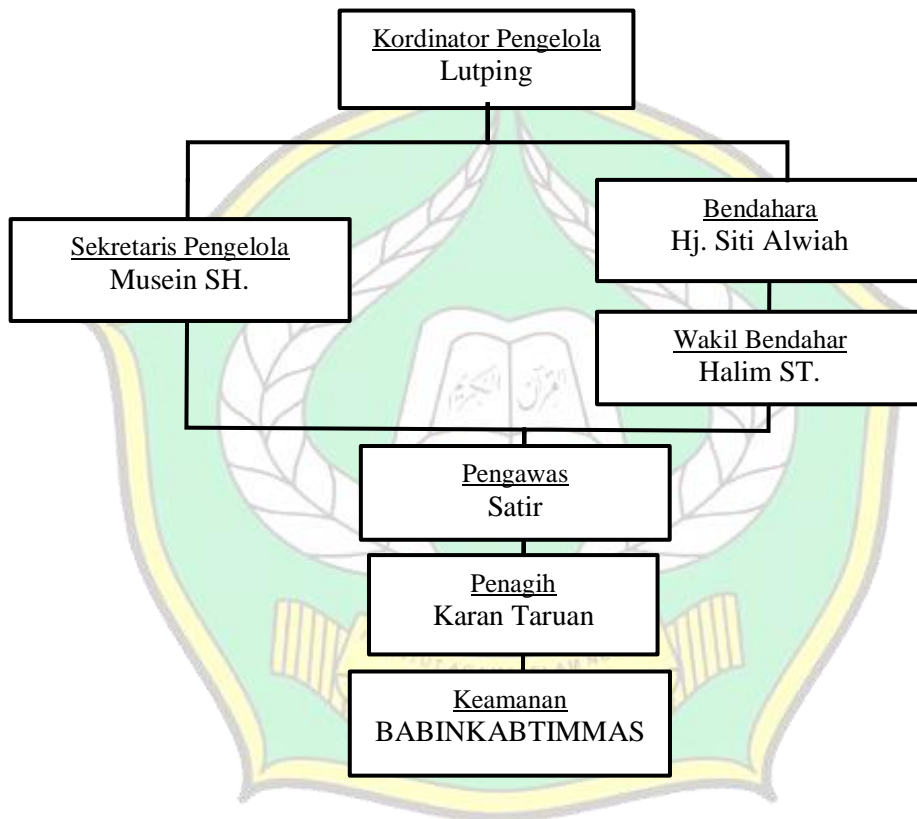
Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan kepariwisataan, dinyatakan bahwa kepariwisataan harus dilaksanakan dengan mengutamakan dan memperhatikan:

- 1) Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya.
- 2) Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup dan
- 4) Kelangsungan usaha pariwisata.

Dalam pengelolaan pariwisata sudah sepatunya dapat memberikan kontibusi dan manfaat besar bagi Daerah, Negarah, telebih lagi pada Masyarakat Lokal setempat. Masyarakat lokal harus dijamin oleh pemerinta sebagaimana amanat konstitusi yaitu “untuk menjamin kesejahteraan rakyat”, dalam hal pemerintah sebagai representasi dari segala aspek salah satunya adalah dalam pemanfaatan potensi sumber daya wisata.

4.2.1 Struktur Organisasi Tata Kelola Pariwisata Pantai Toronipa

Dalam sytem pengelolaan Pariwisata Pantai Toronipa, memiliki sruktur kepengurusan sebagaimana biasanya, agar dalam pengelolaanya dapat terorganisir sesuai dengan konsep dan tujuan yang akan dicapai. Adapun sruktur kepengurusan tata kelola Pariwisata Pantai Toronipa adalah sebgai berikut:



Gambar diatas merupakan struktur kepengurusan tata kelola pariwisata pantai toronipa, hal tersebut disusun berdasarkan hasil kesepakatan pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe dengan pihak Masyarakat Lokal setempat. Hal tersebut juga disusun dan disepakati dengan rencana system tata kelola pariwisata yang dapat terukur, masif dan akuntabel agar dalam system tata kelola pariwisata pantai toronipa dapat terorganisir dengan mudah dan dilaksanakan sesuai

dengan tupoksi dari pengurus serta bidangnya masing-masing yang sudah menjadi ketentuan dan kesepakatan untuk mengelola Pariwisata Pantai Toronipa.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing pengurus tata kelola Pariwisata Pantai Toronipa adalah sebagai berikut:

No.	Posisi	Pelaksana	Tugas
1.	Kordinator Pengelola	Lutping	Mengatur dan mengakomodir sistem pengelolaan Pariwisata Pantai Toronipa.
2.	Sekretaris Pengelola	Musaien SH.	Melaksanakan proses administrasi tata kelola Pariwisata Pantai Toronipa
3.	Bendahara Pengelola	Hj. Siti Alwiah	Menyimpan dan mengelola keuangan Pariwisata Pantai Toronipa
4.	Wakil Bendahara	Halim, ST	Membantu Bendahara dalam menjalankan tugasnya
5.	Pengawas	Satir	Mengawasi Proses berjalan system tata kelola pariwisata
6.	Keamanan	BABINKHATIBMAS	Mengamankan masyarakat dan wisatawan dikawasan Pariwisata Pantai Toronipa

Berdasarkan tabel diatas, dalam system pengelolaan pariwisata telah ditentukan tugas dan pengurusnya serta tupoksi dalam setiap bidangnya, sehingga dalam realisasinya mampu terakomodir secara efektif dan efisien juga mampu teroganisir dengan baik dengan meminimalisir adanya risiko yang akan terjadi.

Namun, dalam system tata kelola pariwisata yang diterapkan dipantai toronipa, tidak sepenuhnya di atur dalam regulasi pemerintah Daerah setempat, melainkan siytem pengelolaanya dapat diklasifikasikan menjadi dua aspek yaitu pada aspek retribusi dan penyediaan sarana dan prasarana, hal ini seperti apa yang telah diungkapkan oleh HJ. Siti Alwiah berdasarakan hasil wawancara :

“Untuk system pengelolaan pantai toronipa sejauh ini belum murni dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah atau dinas pariwisata setempat, pemerintah hanya memungut biaya melalui karcis sebagai retribusi untuk biaya masuk bagi wisatawan, dan untuk sytem pengelolaan wisata pantai mulai dari penyediaan sarana dan prasarana serta kebersihan itu diserahkan sepenuhnya oleh pemilik lahan atau masyarakat lokal yang ada disekitaran bibir pantai untuk memanfaatkan potensi yang dapat bernilai ekonomis bagi mereka, jadi mereka yang berhak atas itu selama mereka tidak melanggar norma dan aturan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, siytem pengelolaan pariwisata pantai toronipa belum secara total dikelola oleh pemerintah setempat, melainkan sebagian masi menggunakan system sosial normatif atau mengacu pada kebiasaan masyarakat lokal sejak pantai toronipa dibuka sebagai kawasan pariwisata dan ramai dikunjungi oleh wisatawan, oleh sebab itu masyarakat lokal memanfaatkan potensi tersebut sebagai sumber mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan ekonomi baik secara individu maupun rumah tangga. Adapun mengenai retribusi dan biaya karcis untuk masuk di area pariwisata itu diambil alih oleh pemerintah setempat sebagai tarif masuk bagi wisatawan yang kemudian digunakan sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selain daripada itu, peran pemerintah juga terdapat pada aspek pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk memudahkan akses bagi wisatawan serta menciptakan daya tarik wisatawan untuk berkunjung dipantai toronipa yang kemudian dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi masyarakat lokal guna memanfaatkan peluang tersebut secara ekonomis dengan berbagai kegiatan ekonomi seperti penyewaan gazebo, vila, kamar mandi umum, kios-kios kecil warung makan,, banana butts dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan dari beberpa responden melalui wawawancara bahwa, dalam system tata kelola pariwisata pantai toronipa belum sepenuhnya dikelolah oleh pemerintah, melainkan dalam system engelolaanya itu masih terbagi menjadi dua basis yaitu ada yang berbasis pemerintah yang dikelolah langsung oleh Pemerintah Daerah setempat dan juga ada yang berbasis masyarkat lokal yaitu dikelolah langsung oleh masyarakat lokal. Diantara pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

4.2.2 Tata Kelola Pariwisata Pantai yang Berbasis Pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria pada Pasal 33 ayat 3 bahwasnya: *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran Rakyat.* Berdasarkan peraturan tersebut maka, pemerintah memiliki wewenang untuk mengelolah suatu kekayaan alam termasuk potensi pariwisata dan dipergunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pengelolaan pariwisata pantai Toronipa ada beberapa bagian yang diambil alih langsung oleh pemerintah daerah setempat diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tarif Biaya Masuk Pantai Untuk Wisatawan (Retribusi)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi dan Jasa Usaha. Di dalam Pasal 45 Ayat 1 dan 2 mengenai Retribusi di Tempat Rekreasi dan Olahraga bahwasanya: *“Subyek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang menggunakan serta menikmati jasa pelayanan di tempat rekreasi dan Olahraga”* (Pasal 1). Sementara di dalam pasal 45 ayat 2 bahwasanya: *Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi”*. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tersebut maka, pihak pemerintah melalui Dinas Pariwisata memiliki wewenang untuk mengelola pariwisata pantai Toronipa pada sektor retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah tertulis.

Sementara di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe pada Pasal 46 ayat 1 mengenai objek retribusi di tempat Rekreasi dan Olahraga bahwasanya: *“Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah”*. Berdasarkan peraturan daerah tersebut maka, terkait retribusi di tempat pariwisata khususnya pantai toronipa di ambil alih oleh Pemerintah daerah setempat. Adapun Hasil dari retribusi tersebut tentunya akan di alokasikan sebagai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta untuk gaji bagi para jasa yang melakukan penagihan pada wisatawan di Pos PAD pada saat masuk di area Pariwisata Pantai Toronipa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe yang telah di sebutkan diatas maka, dalam system pengelolaan pariwisata pantai toronipa masyarakat lokal

kelurahan toronipa dalam hal ini pemerintah Kelurahan Toronipa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe untuk menetapkan terkait tarif biaya pajak dan retribusi untuk masuk di dalam kawasan pariwisata pantai toronipa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2022 yaitu sebesar Rp, 10.000 /orang dengan system pembelian karcis. Hal ini berdasrakan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu respondent atas nama Bapak **Rusli**:

“Untuk tarif biaya masuk dalam pantai itu sudah ditetapkan sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang ada yaitu Rp, 10.000/orang, tapi biasanya kalau mobil atau bus yang muatannya full langsung hitung kapasitasnya saja tidak lagi perkepala, nah setelah itu hasilnya langsung disetor sama pihak pengelola pariwisata pantai toronipa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas oleh bapak Rusli, Ia menyatakan bahwa pihak Pemerintah telah menetapkan tarif biaya masuk pantai berdasarkan peraturan yang ada agar pengunjung merasa aman dan nyaman ketika berkunjung dipantai toronipa. Adapun hasil penmungutan retribusi akan dikumpulkan dan disetor kepada pihak pengelola pantai dalam hal ini bendahara pengelola pantai toronipa. Pernyataan yang serupa oleh bendahara pengelola pantai melalui hasil wawancara pada Ibu **HJ. Siti Alwiah**:

“Ya, uang hasil retribusi nanti dikumpulkan sama bendahara pengelola, selama 6 bulan setelah itu nanti akan dibagi kisaran 50% untuk pihak pemilik lahan , 9% untuk muspika, 8% untuk kelurahan, 10% untuk pengelola, 10% untuk jasa penagi, 8% untuk pengawas, dan 5% untuk pihak keamanan. Sementara untuk PAD itu akan kami bayar sesuai dengan jumlah carcis setiap minggunya, misalnya kita ambil 5 bonggol, 1 bonggol itu harganya Rp, 1.000.000,00 jadi kalau misalnya laku 3 bonggol berarti yang kita setor itu sebesar Rp, 3.000.000,00 itu kita langsung setor di DISPEMDA setiap minggu, nanti sisa dari pembayaran i itu akan dimasukan di kas pengelola pariwisata, kemudian akan dikumpul sampai 6 bulan dan akan dibagi seperti yang sudah saya rincikan tadi”.

Dari hasil wawancara tersebut yang telah diterangkan oleh respondent, maka mengenai hasil retribusi yang didapatkan pada setiap minggunya akan

digunakan terlebih dahulu untuk modal pembelian karcis kepada pihak PEMDA Konawe. Setelah ada hasil dari penjualan karcis tersebut, maka itulah yang akan disetor pada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe sebagai salah satu sektor dari APBD.

2. Pembangunan Infrastruktur dikawasan Pantai Toronipa

Pembangunan infrastruktur dikawasan pariwisata pantai toronipa sangat di dukung oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (PEMPROV SULTRA). Saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sedang membangun infrastruktur secara besar-besaran sepanjang area pantai toronipa. Mulai dari akses dengan kualitas jalan beton menuju pantai toronip sepanjang 20 km dengan kapasitas 2 jalur serta pembangunan gerbang masuk di kawasan pariwisata dan gerbang masuk di dalam area pantai toronipa. hal tidak lain bertujuan untuk mendukung adanya akses yang mudah bagi wisatawan untuk berkunjung di pantai Toronipa.

Selain daripada itu, ada juga pembangunan infrastruktur jalan lingkar di dalam Area pariwisata pantai toronipa dengan tugu buah nipa sebagai ikon Pantai toronipa. Dengan adanya pembanguna infrastruktur yang memadai ini, maka tentu minat daya dan tarik bagi wisatawan untuk datang berkunjung di pantai toronipa akan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini juga sangat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal untuk meraut keuntungan dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang diperlukan oleh wisatawan.

Dengan adanya program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah maka, tentu dapat menunjang adanya status pariwisata pantai toronipa sebagai destinasi wisata berkepanjangan dan menjadi tempat yang sangat vavorit untuk dikunjungi

baik itu wisatawan lokal maupun mancanegara. Sesuai dengan hasil wawancara kepada salah satu informan atas nama Intor:

“Kami sebagai masyarakat lokal disini, tentu sangat bersyukur dengan adanya pembangunan infrastruktur di toronipa ini, karena semenjak adanya pembangunan jalan yang jalur dua, saya liat-liat pengunjung semakin ramai datang di pantai toronipa, beda dengan waktu-waktu kemarin, mungkin aksesnya masih agak sulit untuk dilalui tidak seperti sekarang ini, dulunya kalau kita mau kekendari itu harus menempuh waktu selama kurang lebih 30 menit tapi sekarang itu hanya butuh waktu 15 menit dari kendari ke toronipa kita sudah sampemi, ya alasannya pasti karena pembangunan infrastruktur saat ini itu sudah memadai”.

Pernyataan serupa yang telah di sampaikan oleh Bapak Rusdi sebagai Informan melalui hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti beliau mengatakan Bahwa:

“Sebenarnya untuk pembangunan Infrastruktur di toronipa ini tujuannya untuk mempermudah akses bagi masyarakat lokal yang tinggal di daerah sekitaran sini dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan juga untuk wisatawan yang mau berkunjung dipantai toronipa, ini juga salah satu wujud dari pembangunan daerah secara signifikan yang sudah dijanjikan sama PEMPROV SULTRA semenjak masa kampanye tahun 2018, jadi semenjak Bapak Ali Mazi naik sebagai Gubernur SULTRA, sehingga proyek pembangunan infrastruktur di kawasan toronipa ini menjadi skala prioritas”.

Pernyataan yang sama, yang disampaikan oleh tokoh masyarakat kelurahan Toronipa atas Nama **Satir**:

Untuk Pembangunan Infrastruktur sampai saat ini itu sudah masuk pada tahapan finishing, untuk persentasenya mungkin sudah sekitar 80% menuju tahap perampungan, adapun infrastruktur yang dibangun itu adalah jalan beton yang kapasitas 2 jalur, Jembatan, irigasi, dan gerbang Selamat Datang di Kawasan Pariwisata Pantai Toronipa yang terletak di Kendari Caddi. Untuk saat ini mungkin itu saja program pembangunan yang saya tau, tapi tidak tau kedepannya bisa jadi akan ada program pembangunan yang akan dirancang.

Dari beberapa pernyataan diatas, peneliti juga telah melakukan wawancara kepada salah satu responden yang merupakan pengunjung/wisatawan yang tengah datang berlibur di Pantai Toronipa atas Nama **Muliadi** :

“Menurut saya, dengan adanya pembangunan infrastruktur di toronipa ini sangat mempermudah wisatawan untuk masuk berkunjung. Sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan adanya pembangunan, toronipa ini dirasa kayak dekat sekali jarak tempuhnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk pembangunan infrastruktur di skawasan pariwisata toronipa sampai saat ini masih terus berlanjut dan ditingkatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pada tahap perampungan. Melihat situasi dan kondisi pantai toronipa merupakan kawasan yang sangat strategis untuk dikembangkan dalam sektor kepariwistaan dan juga akan menjadi salah satu ikon Sulawesi Tenggara, sehingga sampai pada saat ini pantai toronipa selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan dengan adanya fasilitas infrastruktur yang telah disediakan sebagai akses menuju kawasan Pariwisata.

3. Keamanan di Dalam Area Pantai Toronipa

Keamanan merupakan sektor yang sangat vital dalam suatu kehidupan sosial, agar dapat menciptakan kenyamanan dan ketertiban ditenga-tengah masyarakat. Perlunya menjaga keamanan dalam setiap situasi dan kondisi dilingkungan manapun, dengan adanya tingkat keamanan yang baik maka tingkat kejahatan dan kriminal juga pasti akan terminimalisir sehingga kesempatan untuk mencelakai diri sendiri maupun orang lain yang ada disekitar mampu di cegah dengan baik melalui kesadaran diri secara internal maupun eksternal.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang tugas Kepolisian Republik Indonesia yaitu Memelihara Kemanan, Menegakan Hukum, Memberikan perlindungan, mengayomi, dan pelayanan kepada Masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pihak kepolisian memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap keamanan masyarakat khususnya di kawasan Pariwisata.

Mengenai keamanan dalam lingkup pariwisata pantai toronipa, pemerintah setempat sudah mengamanatkan kepada pihak Kepolisian Sektor (POLSEK) dan KORAMIL (TNI) Kecamatan Soropia untuk selalu meningkatkan kamanan secara ketat di sekitaran kawasan area Pariwisata Pantai Toronipa. Melalui POLSEK dan KORAMIL setempat, aparat Keamanan selalu mengadakan pengawasan di dalam area Pariwisata Pantai Toronipa mulai dari gerbang masuk pantai toronipa samapai di dalam kawasan Pantai Toronipa.

Hal ini dilakukan demi mencegah adanya potensi terjadinya pelanggaran hukum dan juga untuk meminimalisir adanya tingkat kejahatan ditengah-tengah masyarakat khususnya di dalam area Pariwisata Pantai Toronipa. sebagaimana yang diketahui bahwa, tempat keramaian merupakan zona yang rawan terjadinya kerusuhan antar kelompok maupun individu, sehingga dengan adanya pengawasan yang ketat dari pihak keamanan dalam hal ini pihak Kepolisian dan TNI, tentu dapat mencegah dan meminimalisir adanya potensi terjadinya tindakan kriminal di dalam area Pariwista Pantai Toronipa.

Dalam upaya pengawasan dan keamanan di sekitaran area pariwisata, peneliti telah melakukan wawancara kepada salah satu aparat kepolisian dalam hal ini BABINKHABTIMMAS kelurahan toronipa atas Nama Zainal:

“Untuk keamanan pariwisata disini, kami sudah bekerja sama juga dengan pihak koramil untuk selalu menjaga keamanan secara preventif karena ini merupakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai aparat Kepolisian, kami selalu rutin melakukan pengawasan mulai dari kegiatan maupun rutinitas masyarakat disini, terutama di gerbang masuk pantai sini kami awasi dengan ketat kemudian di dalam area tanjung/pantai juga kami lakukan pengawasan secara intens jangan sampai ada terjadi apa-apa sama wisatawan, jangan sampai ada yang bawa sajam, atau obat-obatan terlarang dan lain sebagainya yang bisa membahayakan wisatawan lain.

Pernyataan yang serupa yang disampaikan oleh BABINSA (TNI) kelurahan toronipa beliau menyatakan bahwa:

“Dalam upaya pengamanan di kawasan pariwisata, kami hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pihak keamanan dalam masyarakat, kebetulan juga toronipa masuk dalam kawasan pariwisata, maka tentu kami fokuskan pengawasan lebih intensif di area pariwisata khususnya gerbang masuk, mulai dari aktifitas masyarakat lokal disini, samapai dengan wisatawan yang datang berkunjung dipantai toronipa ini, kami selalu melakukan pengawasan agar tidak terjadi yang namanya kerusuhan dan lain sebagainya”.

Pernyataan yang serupa yang disampaikan oleh pengawas pengelola pariwisata pantai toronipa beliau menyatakan bahwa:

“Kami disini hanya mengawasi jalanya system tata kelola pariwisata, adapun keamanan itu ada pihak Kepolisian dan juga pihak KORAMIL yang menangani itu, tugas saya disini mengawasi proses penagihan tarif biaya masuk untuk wisatawan/pengunjung”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai keamanan dalam lingkup Pariwisata Pantai Toronipa telah diatur sedemikian rupa agar dapat mengantisipasi adanya kejahatan dalam masyarakat maupun wisatawan. Adanya pihak Kepolisian dan KORAMIL (TNI) yang bertanggung jawab untuk menangani persoalan yang hendak timbul di tenga-tengah masyarakat dan dibantu dengan kesadaran masyarakat lokal atas tindakan yang dapat berdampak pada pelanggaran norma dan hukum serta dibantu dengan pengawas pengelola pariwisata yang merupakan bagian dari masyarakat lokal setempat.

4.2.2 Basis Masyarakat Lokal

Dalam pengelolaan Pariwisata Pantai Toronipa, Masyarakat Lokal sangat berperan aktif dalam membantu system tata kelola Pariwisata Pantai Toronipa. Dengan adanya kontribusi besar dari pihak masyarakat lokal maka hal ini dapat membantu mengembangkan wisata pantai toronipa sehingga minat wisatawan yang berkunjung dipantai toronipa semakin meningkat. Adapun basis asyarakat Lokal dalam system tata kelola pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Perawatan Lingkungan dan Kebersihan Pantai

Dalam aktifitas pariwisata pantai toronipa, kebersihan lingkungan merupakan hal yang paling utama dalam meningkatkan kualitas sehingga memberikan daya tarik bagi wisatawan. Masyarakat lokal memiliki peran dalam menjaga kebersihan pantai, selain karena lahan yang dimiliki sendiri masuk dalam kawasan pariwisata hal ini juga tentu karena adanya intruksi dari pihak Pemerintah untuk selalu memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan sepanjang kawasan Pantai Toronipa yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang asri dan juga untuk menciptakan kenyamanan bagi wisatawan ketika datang berkunjung di pantai Toronipa, hal ini sesuai dengan pernyataan oleh salah satu Masyarakat Lokal melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti atas nama Rahmadi Nur:

Kami selaku pemilik lahan disini, karena lahan kami masuk di dalam kawasan pantai toronipa, jadi untuk kebersihan itu menjadi tanggung jawab masing-masing bagi semua yang memiliki lahan di dalam kawasan pantai toronipa ini. Mulai dari kebersihan lingkungannya dan kebersihan fasilitas yang telah kami sediakan seperti gazebo, villa, kamar mandi dan lain sebagainya.

Selain dari pada itu, ada juga pernyataan yang disampaikan oleh responden yang merupakan masyarakat lokal dan juga sebagai pengelola pantai toronipa yang memiliki lahan di dalam kawasan pantai Toronipa atas nama Fiqam :

“Iyaa, kebersihan lingkungan sangat kami utamakan kalau disini, buat apa juga pantainya bagus kalau disekitarnya itu penuh dengan sampah kan sangat tidak elok untuk dilihat, jadi untuk kebersihan disini itu sudah tanggung jawab pemilik lahan disini. ketika pengunjung sudah balik, disitumi waktunya kita untuk membersihkan dan untuk pengunjung kami tidak bebaskan mereka untuk membersihkan, tetapi kita sampaikan dan tegaskan “mohon peduli dengan kebersihan lingkungan disekitaran sini” karena itu sakirah harus butuh kesadaran untuk sama-sama menjaga kebersihan lingkungan, bukan cuman ditoronipa sini, tapi semuanya dimanapun dan kapanpun kita berada”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk kebersihan di dalam kawasan Pariwisata Pantai Toronipa merupakan tanggung jawab dari masing-masing pemilik

lahan untuk menjaga dan merawat kebersihan lingkungan agar tetap asri dan indah. Namun kepedulian terhadap kebersihan lingkungan merupakan kewajiban bagi setiap insan atas kesadaran untuk tetap senantiasa memerihara dan menjaga lingkungan agar tetap sehat dan tidak melakukan kerusakan lingkungan di muka bumi, dimanapun kita berada keawjiban tersebut harus dilestarikan.

2. Penataan Lokasi di dalam Area Pantai

Penataan lokasi didalam area pantai toronipa telah diatur berdasarkan komitmen masyarakat lokal yang memiliki lahan di dalam area pantai toronipa. setiap pihak yang mempunyai lahan di dalam area pantai toronipa memiliki hak tersendiri dalam mengelola lahan tersebut, sehingga lahan yang dimilikinya dimanfaatkan sebagai media yang diperlukan oleh pengunjung/wistawan kemudian disewakan oleh pemilik lahan, sebagai wujud dari praktik ekonomi secara komersial, misalnya pemilik lahan memanfaatkan lahan yang dimilikinya dengan membangun vila, gazebo dan kamar mandi umum, kemudian setiap pengunjung/wistawan yang ingin membutuhkan barang tersebut harus melakukan transaksi sewa-menyewa dengan pemiliknya.

Dalam penataan lokasi tersebut, pemilik lahan juga harus berlandaskan pada aturan dan norma serta kesepakatan yang berlaku dalam masyarakat. Tidak serta-merta membangun dengan sesuka hati. Harus melalui kesepakatan secara mufakat dan seksama dengan pihak masyarakat lokal lainnya, sehingga tidak terjadi yang namanya ketimpangan sosial sesama masyarakat. Dengan tetap menjaga hubungan keharmonisan dalam bermasyarakat.

Selain penataan lokasi yang di desain oleh masing-masing pemilik lahan, ada juga beberapa bangunan yang didalam kawasan pantai toronipa yang

merupakan kontribusi pemerintah terhadap masyarakat lokal untuk mengembangkan dan memperindah kawasan pariwisata pantai toronipa diantara lain yaitu pembangunan bundaran tugu nipa, sebagai ikon Pariwisata Pantai Toronipa, juga ada pembangunan gapura sebagai fgerbang masuk kawasan Pariwisata dan ada juga pembangunan Pos PAD untuk para digunakan sebagai tempat pengawasan dan penagihan biaya masuk di dalam kawasan Pariwisata.

Pembangunan tersebut berada didalam kawasan pariwisata, pemerintah Provinsi sengaja membangun kawasan tersebut sebagai wujud kontribusi terhadap masyarakat lokal pada sektor pariwisata. Agar masyarakat lokal mampu dengan mudah untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata secara signifikan sehingga dapat meningkatkan daya tarik bagi wisatawan

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa responden mengenai penataan lokasi di dalam kawasan pariwisata pantai toronipa. Stas nama **Simming** beliu mengatakan Bahwa:

“Untuk penataan lokasi disini itu disusun sesuai dengan pemilik lahan masing-masing di sepanjang tanjung ini (pantai toronipa). jadi pemilik lahan selain membangun rumah di dalam area pantai, mereka juga menyediakan beberapa fasilitas di sekeliling halamannya yang kian dibutuhkan oleh para pengunjung/wisatawan kemudian fasilitas itu disewakan bagi yang memerlukan”.

Pernyataan yang sama juga yang disampaikan oleh responden lain atas nama

Bpk Randi beliau mengatakan bahwa:

Kami disini hanya memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, dulu saya tidak kepikiran kalau kawasan ini masuk sebagai daera pariwisata. Dulu saya berkerja sebagai nelayan biasa, pada saat kawasan tanjung (pantai Toronipa) ini ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, oleh sebab itu kami yang memiliki lahan disini bersepakat untuk menata ruang kawasan ini seperti layaknya pariwisata pada umumnya dengan menyediakan fasilitas sarana bagi wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, untuk penataan lokasi di dalam kawasan Pariwisata Pantai Toronipa disesuaikan berdasarkan masing-masing

pemilik lahan. Masing-masing pemilik lahan di dalam area Pantai sudah memiliki batas-batas dengan diameter tertentu dan diberikan hak nya untuk menata ruang kawasan pariwisata pantai toronipa berdasarkan komitmen dan kesepakatan bersama dari masing-masing pemilik lahan tanpa adanya ketimpangan yang dapat merugikan satu sama lain untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi pariwisata pantai toronipa agar tetap ramai dikunjungi oleh wisatawan.

3. Aktifitas Jual beli dan sewa menyewa di dalam area Pantai Toronipa

Sebagaiman pada umumnya, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup selalu memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya, sebagai sumber mata pencaharian demi memenuhi kebutuhan hidup secara primer, sekunder maupun tersier. Di dalam kawasan pariwisata merupakan salah satu lokasi yang strategis untuk meningkatkan pendapatan secara ekonomis, karena pariwisata selalu ramai di kunjungi dari kalangan wisatawan yang berkunjung.

Aktifitas jual beli yang memungkinkan dapat di butuhkan oleh konsumen yang notabene dari kalangan wisatawan yang berkunjung dipantai toronipa, maka tentu masyarakat lokal menyediakan sarana tersebut sebagai peluang ekonomi bagi mereka. Masyarakat lokal menyediakan beberapa sarana yang dapat diperlukan oleh wisatawan di dalam area pantai toronipa, agar dapat memudahkan wisatawan ketika memerlukan sesuatu yang menjadi keperluan bagi mereka.

Masyrakat lokal telah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh wistawan ketika berkunjung dipantai toronipa, seperti kios-kios, warung makan, lapak yang menjual jajanan, gazebo, sarana hiburan, kamar mandi umum, tenda camping, jasa tag foto dan lain sebagainya. Hal tersebut disedian oleh masyarakat kemudian di perjual belikan dan disewakan untuk para wisatawan yang hadir dan berkunjung

dipantai toronipa. Secara tidak langsung, di dalam kawasan pariwisata toronipa terjadi yang perputaran ekonomi, hal ini juga merupakan peluang bagi masyarakat lokal sebagai sumber mata pencaharian yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi secara individu maupun rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa respondent terkait aktifitas jual beli di dalam kawasan pariwisata pantai toronipa, hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data dan informasi secara valid dari pelaku usaha yang tengah melakukan kegiatan jual beli di dalam kawasan pariwisata pantai toronipa, berdasarkan pernyataan dari Ibu Muliani beliau mengatakan bahwa:

“Kami disini hanya berjualan, karena melihat kondisi wisata disini sangat ramai dikunjungi, jadi kami mafaatkan peluang untuk meraut keuntungan. Adapun yang kami lakukan disini juga bukan cuman berjualan tetapi kami menyewakan juga gazebo air bersi dan kamar mandi untuk ruang ganti”.

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh **Bpk Fikram**, selaku masyarakat lokal yang memiliki lahan di dalam kawasan pariwisata pantai toronipa beliau mengatakan bahwa:

Kami melakukan aktifitas berjualan dan sewa menyewa disini itu merupakan salah satu wujud dari tata kelola pariwisata, karena jika kami tidak menyediakan ini maka pasti otomatis wisatawan akan sunyi dan juga pasti akan kewalahan jika mereka menyediakan perlengkapan dari rumah mereka masing-masing, maka dari itu kami sebagai masyarakat lokal yang diberikan kesempatan untuk mengelola pariwisata pantai toronipa ini dengan memanfaatkan peluang tersebut yang dapat dibutuhkan oleh para wisatawan.

Kemudian di jelaskan juga oleh **Bpk Rusdi** yang juga merupakan masyarakat lokal setempat yang pemilik lahan didalam area pantai toronipa, beliau mengatakan bahwa:

“Yang berjualan disini itu rata-rata merupakan kalangan dari masyarakat lokal asli sini, ada yang memiliki lahan kemudian mereka memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun kios-kios, gazebo dan saran lainnya yang berpeluang untuk

dibutuhkan oleh para wisatawan. Kemudian juga ada orang luar yang bukan termasuk masyarakat lokal asli toronipa yang datang berjualan hanya mereka tidak menetap mereka pulang balik dari rumah mereka kesini untuk menjajahkan jualan mereka, biasanya itu di akhir-akhir pekan baru mereka masuk”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai system tata kelolah pariwisata pantai toronipa yang dijalankan oleh masyarakat lokal salah satunya juga terdapat pada aspek aktifitas jual beli dan sewa menyewa dalam area pantai toronipa. mereka menjalankan hal tersebut atas dasar memiliki hak atas tanah, lalu kemudian mereka memanfaatkan lahan tersebut sebagai sumber pendapatan dengan memanfaatkan peluang sebagai bisnis yang dapat diperlukan sebagai kebutuhan dari para kalangan wisatawan.

4.3 Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Tata Kelola Pariwisata Pantai Toronipa

Dalam pengembangan tata kelola Pariwisata Pantai Toronipa, masyarakat lokal sangat berperan aktif dalam meningkatkan Kualitas dan kapasitas pariwisata yang kian diperlukan oleh wisatawan. Kontribusi masyarakat lokal sangat diperlukan dalam pengembangan tata kelola pariwisata sebab, masyarakat lokal juga memiliki hak dalam pengembangan tata kelola pariwisata dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki menjadi kawasan area pariwisata. Adapun peran Masyarakat Lokal dalam meningkatkan tata kelola pariwisata Pantai Toronipa adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kerjasama dengan Pemerintah Daerah Dalam Penagihan Biaya Masuk Pariwisata

Dalam pengelolaan pariwisata pantai toronipa, masyarakat lokal turut andil dalam melaksanakan penagihan tarif biaya masuk (Retribusi) pada wisatawan. Penagihan tarif biaya masuk ini dilakukan di pos PAD yang

terletak di gerbang masuk area pariwisata pantai toronipa yang biasa masyarakat lokal setempat menyebutnya dengan gerbang masuk tanjung.

System penagihan tarif biaya masuk yang dilakukan menggunakan berdasarkan pada kesepakatan antara masyarakat lokal kelurahan toronipa dengan pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Konawe. Pemerinta Daerah memberikan kempatan pada masyarakat lokal untuk mengelola pariwisata pantai toronipa, hal ini berawal dari petisi yang dilakukan oleh masyarakat lokal kepada Pemerintah Daerah, agar jasa pengelola pariwisata pantai toronipa merupakan bagian dari kalangan masyarakat lokal setempat.

Melalui aparat keluraha toronipa, proses penagihan tarif biaya masuk wisata telah disepakati bersama oleh kalangan masyarakat lokal setempat dengan pihak Pemerintah Daerah terkait kepengurusan beserta nominal biaya masuk pariwisata. Adapun kepengurusan tata kelola pariwisata yang difungsikan disini merupakan kalangan dari masyarakat lokal yang berdomisili di kelurahan toronipa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada salah satu pihak pengelola pariwisata pantai toronipa atas nama Bapak **Satir** :

”Yang kami lakukan disini itu sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh masyarakat lokal dan pihak Pemerintah Derah. Jadi kami jalankan saja sesuai apa yang telah disepakati, untuk kepengurusanya itu memang melalui SK yang sudah diterbitkan dari Pemerinta Daerah Kabutaen Konawe, tapi sebelumnya kita sudah rekomendasikan memang nama-namanya yang layak untuk jadi pengurus untuk mengelola pariwisata ini. Jadi itu hari, kita tinggal tunggu saja SK nya keluar dari PEMDA terus kita laksanakan sesuai kesepakatan dan aturan yang berlaku”.

Pernyataan yang sama juga, yang telah disampaikan oleh ketua karan taruna sippa masse-masse kelurahan toronipa atas nama **Indrawang** :

“Kami memang selalu rutin mengadakan penagihan di gerbang sini, apalagi dihari-hari libur atau weekend. Kami diberikan jadwal khusus oleh pihak aparat kelurahan untuk membantu melakukan penagihan pada wisatawan yang berkunjung, ini juga merupakan salah satu wujud produktifitas karan taruan kelurahan toronipa untuk turut andil dalam setiap kegiatan masyarakat serta pengembangan daerah kami, apa lagi daerah kami ini masuk dalam kawasan pariwisata”.

Pernyataan yang serupa juga, yang telah disampaikan oleh **Ibu Hj. Siti Alwiah**, selaku Kordinator Pengelola Pariwisata Pantai toronipa beliau mengatakan bahwa:

“Memang, yang melakukan penagihan di gerbang sini itu merupakan anak-anak yang tinggal di kelurahan toronipa sini, kami sengaja memberikan kesempatan bagi mereka supaya mereka juga bisa menghasilkan uang sendiri, apa lagi mereka semua ini notabennya lagi sementara kuliah juga dan bahkan adami juga yang sudah berkeluarga, jadi bersyukur skali daerah ini masuk dalam kawasan pariwisata selain dari pada banyak dikunjungi orang, itu juga bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat lokal disini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dari beberapa responden bahwa, salah satu peran masyarakat dalam pengembangan pariwisata yaitu terdapat pada kontribusi yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam melakukan penagihan tarif biaya masuk/retribusi kepada wisatawan yang hendak berkunjung dipantai toronipa, adapun proses penagihan tersebut dilakukan di gerbang masuk area pariwisata pantai toronipa.

Prosesi penagihan tarif biaya masuk/retribusi di pantai toronipa dilakukan berdasarkan pada intruksi dari pemerintah Daerah Kabupaten Konawe serta kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat lokal setempat agar potensi pariwisata pantai toronipa dikelola melalui jasa masyarakat lokal di kelurahan toronipa. kemudian dana yang terkumpul dari hasil penagihan

tersebut di alokasikan untuk cas Daerah atau APBD, serta untuk gaji parah jasa yang melakukan penagihan di gerbang masuk Pantai Toronipa.

4.3.2 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Peran masyarakat lokal dalam pengembangan tata kelola pariwisata pantai toronipa juga terdapat pada aspek penyediaan sarana dan prasarana. Sebagaimana layaknya tempat wisata, perlu ada yang namanya fasilitas sarana maupun prasarana sebagai penunjang kualitas pariwisata sehingga dapat membuat daya tarik bagi wistawan/pengunjung untuk datang berlibur dipantai toronipa.

Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana di pantai toronipa, merupakan hak bagi masyarakat lokal setempat yang memiliki lahan disepanjang bibir pantai yang masuk dalam kawasan pariwisata. Setiap yang memiliki lahan di dalam kawasan pantai toronipa disediakan sebagai prasana bagi wistawan kemudian, masyarakat lokal membangun beberapa sarana seperti gazebo, villa, kamar mandi umum, sarana hiburan dan lain sebagainya, Sebagai bentuk produktifitas dalam mengelola pariwisata.

Adapun lokasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai fasilitas bagi wistawan merupakan lahan tersendiri yang dimiliki dan telah bersertifikat hak milik. Kemudian masyarakat lokal berinisiatif untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di pantai toronipa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa respondent terkait penyediaan sfasilitas sarana maupun prasarana di dalam kawasan area pariwiwsata pantai toronipa, bapak lutping menyatakan bahwa:

Kami menyediakan fasilitas ini kemudian kami sewakan sama wistawan yang berkunjung dipantai ini, ketika mereka membutuhkan apa-apa saja yang menjadi keperluan mereka jadi tidak jauh-jauhmi lagi untuk keluar cari apa-apa diluar sana, kami menyediakan kamar mandi lengkap dengan ruang gantinya, ada juga gazebo, villa klau ada yang mau bermalam, ada juga saran hiburan kalau mereka mau naik banana buts tinggal kasi tau saja dan semua itu tidak gratis karenah lewat situmi juga kita cari uang.

Pernyataan yang sama, disampaikan oleh ibu Nurma sebagai salah satu pemilik lahan didalam area pantai toronipa beliau mengatakan bahwa:

“Saya disini menyediakan gazebo, Villa, kamar mandi & WC, kios, box untuk jual minuman, ada juga alat memasak, spiker, dan saya juga punya sarana hiburan berupa banana buts. Saya rasa itu sudah cukup memadai untuk kebutuhan para wistawan yang datang berkunjung disini dan semuanya itu tidak gratis, semuanya itu saya sewakan adapun harganya itu menyesuaikan juga dengan harga kebutuhan lainya dan juga tidak terlalu membebankan bagi wisatan/pengunjun”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai peran masyarakat lokal pada penyediaan sarana dan prasarana bagi wisatawan di pantai toronipa dilakukan oleh masyarakat lokal setempat, sebagai salah satu wujud produktifitas dalam pengelolaan pariwisata. Masyarakat lokal yang memiliki lahan di dalam kawasan area pariwisata pantai toronipa diberikan hak dan kesempatan sepenuhnya oleh pemerintah setempat untuk meningkatkan potensi secara ekonomi komersial dan dalam sektor pariwisata, hal ini juga tentu akan berimplikasi dengan adanya peningkatan pada APBD Melalui pemanfaatan dan produktifitas dalam sektor kepariwisataan.

4.3.3 Meningkatkan UMKM di Dalam Kawasan Pariwisata Pantai Toronipa

Aktifitas kepariwisataan tidak hanya terdapat pada pemanfaatan lokasi yang berpotensi untuk dikunjungi banyak orang dan juga bukan hanya terdapat pada kegiatan wisatawan yang ingin datang berlibur dan

menghibur diri, melainkan aktifitas kepariwisataan mencakup banyak aspek yang dimana di dalam aktifitas tersebut terdapat nilai yang bisa saling membutuhkan satu sama lain. Diantaranya adalah dengan adanya aktifitas secara ekonomis maupun komersial sehingga dapat menciptakan nuansa kehidupan masyarakat yang kreatif, inovatif dan produktifitas.

Kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah maka tentu para pelaku usaha harus mampu memanfaatkan peluang dan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya dengan cara meningakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan adanya aktifitas tersebut, maka dapat mempercepat perputaran ekonomi disuatu daerah dan mampu meningkatkan pendapatan secara merata.

Untuk menunjang adanya perputaran ekonomi dalam lingkup masyarakat lokal, maka perlu adanya peningkatan dan pegenembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Hal tersebut sudah menjadi fenomena umum yang dilakukan oleh masyarakat lokal kelurahan toronipa. Mereka memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di pantai toronipa dengan melakukan aktifitas perekonomian dalam lingkup pariwisata untuk menunjang adanya perputaran ekonomi dalam skala daerah.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa responden untuk menemukan suatu keterangan secara valid dari pelaku UMKM di dalam lingkup pariwisata. Melalui hasil wawancara kepada Bpk Syawal beliau mengatakan bahwa:

“Aktifitas jual beli di dalam kawasan pariwisata ini musti di kembangkan, karena otomatis wisatawan membutuhkan hal demikian bukan hanya sekedar datang untuk berlibur, peluang itumi yang dimanfaatkan masyarakat lokal disini, sehingga dapat mengembangkan pendapatan

masyarakat lokal disini dan tentu memudahkan juga bagi wisatawan intinya sanling memnguntungkan lah, antara pelaku usaha dengan wisatawan sebagai konsumen”.

Pernyataan yang sama juga yang disampaikan oleh salah satu responden malalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti atas nama Ibu Diana beliau mengatakan bahwa:

“Kami berjualan disini sudah cukup lama, semenjak pariwisata pantai toronipa ini dibuka dan dikenal banyak wistawan dari berbagai kalangan. Kami sengaja memanfaatkan peluang ini karena saya rasa cukup menjanjikan dengan melihat kondisi dan situasi para pengunjung yang tiap hari kian memadati kawasan ini, apa lagi pas kena hari-libur begitu mereka berbondong-bondong datang berlibur bersama keluarga dan teman-teman, otomatis mereka membutuhkan beberapa keperluan seperti makana, minuman dan lain sebagainya, oleh karena itu kemi membuka lapak jualan supaya mereka tidak jauh-jauh lagi untuk mencari diluar sana” disini kami menyediakan dan itu juga salah satu keuntungan bagi kami sebagai pelaku usaha”.

Pernyataan yang serupa juga di sampaikan oleh salah satu responden malalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan **Bpk Rifki** beliau mengatakan bahwa:

“Untuk penjual-penjual disini itu merupakan dari kalangan masyarakat lokal asli sini dan ada juga yang berasal dari luar, adapun masyarakat lokal yang jualan disini itu notabeneanya pemilik lahan. Adapun yang tidak memiliki lahan itu sebagian mereka sewa dan ada juga yang bekerjasama dan selalu kompak untuk mendapatkan hasil kemudian kami berikan upah yang cukup. Adapun penjual-penjual yang dari luar itu mereka rata-rata penjual keliling dan tidak menetap, kayak yang jual bakso, somay, es crim, sate pokea dan lain sebagainya, itu bukan dari masyarakat lokal asli sini tapi mereka berasal dari luar toronipa, mereka di izinkan untuk berjualan didalam kawasan pariwisata pantai toronipa, hanya saja kami berikan syarat yaitu setiap kali masuk mereka harus menyetor untuk pajak seikhlasnya dan uangnya itu kami alokasikan untuk anggaran pembangunan Masjid Nurul Falah yang terletak di kelurahan toronipa”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah dilakukan oleh peneliti, mengenai peran masyarakat lokal terhadap pengembangan tata kelola

pariwisata pantai toronipa terdapat juga pada aspek peningkatan UMKM yang dilakukan oleh masyarakat lokal setempat. Dengan adanya peningkatan UMKM di dalam kawasan pariwisata dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan Daerah juga dapat memberikan feedback positif terhadap pendapatan masyarakat lokal.

4.3.4 Perawatan Lingkungan dan Kebersihan Pantai

Sudah sepatutnya perawatan lingkungan dan kebersihan di dalam kawasan pariwisata pantai toronipa untuk selalu di jaga dan dilestarikan melalui kesadaran setiap individu baik dari kalangan masyarakat lokal maupun wistawan. Perlu adanya perhatian yang penuh terhadap kebersihan lingkungan di dalam kawasan pariwisata pantai toronipa, agar lingkungannya tetap asri dan sehat sehingga dapat menciptakan daya tarik bagi wistawan.

Peran masyarakat lokal dalam meningkatkan kualitas pariwisata pantai toronipa juga terdapat pada aspek kebersihan lingkungannya. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bagi setiap pemilik lahan yang masuk dalam kawasan area pariwisata. Dalam sisystem tata kelola pariwisata, masyarakat lokal sangat memprioritaskan kebersihan lingkungan disepanjang kawasan pariwisata pantai toronipa, agar dapat meningkatkan kualitas tata kelola pariwisata dengan lingkungan yang nyaman, sehat dan asri. malalui kinerja masyarakat lokal serta kesadaran para pengunjung/wisatawan terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

Mengenai peran masyarakat lokal dalam menjaga keersihan lingkungan di dalam kawasan pariwisata pantai toronipa, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa responden untuk mendapatkan

keterangan yang lebih valid. Melalui pernyataan dari **Bpk Fikram** beliau mengatakan bahwa:

“Untuk upaya kebersihan lingkungan dalam kawasan pariwisata pantai toronipa ini, itu merupakan tanggung jawab kami sebagai pemilik lahan, kami selalu rutin membersihkan lingkungan dalam kawasan pantai ini, agar wisatawan nyaman ketika datang berkunjung, kemudian kami juga selalu menghimbau dan selalu mengingatkan kepada para pengunjung/wisatawan untuk selalu kooperatif dan bekerjasama untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dalam kawasan ini”.

Pernyataan yang serupa juga di sampaikan oleh salah satu responden terkait kebersihan lingkungan dalam kawasan pariwisata pantai toronipa, melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada **Bpk Syawal** beliau mengatakan bahwa:

“Kebersihan lingkungan itu harus diutamakan dalam setiap usaha, usaha manapun itu. Apa lagi macam pariwisata, keindahannya itu tergantung pada kondisi kebersihan lingkungannya kalau kotor kan ndak mungkin dijadikan kawasan pariwisata, letak estetikanya itu terdapat pada kebersihannya, jadi bagi saya selaku masyarakat lokal sini, saya selalu memperhatikan kondisi kebersihan lingkungan dikawasan sini dan saya juga selalu menghimbau kepada para wisatawan untuk sadar dan berkerjasama untuk menjaga kebersihan lingkungan di kawasan ini”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, mengenai kebersihan lingkungan di dalam kawasan area pariwisata pantai toronipa merupakan tanggung jawab untuk para pemilik lahan. Namun tidak lupa pula masyarakat lokal setempat, selalu menghimbau dan mengingatkan para pengunjung/wisatawan agar selalu bekerjasama dalam menjaga serta memelihara kebersihan lingkungan disepanjang kawasan pantai toronipa ketika hendak melakukan aktivitas wisata, dengan tujuan agar lingkungan pariwisata pantai toronipa tetap lestari, asri dan sehat sehingga kualitas

sumber daya wisata tetap terjaga dan menjadi daya tarik tertentu bagi para wisatawan untuk kembali berkunjung di kemudian hari.

4.3.6 Pelayanan yang Ramah pada Pengunjung/Wisatawan

Pelayanan merupakan salah satu hal yang paling utama dalam setiap aktifitas pekerjaan, pelayanan yang ramah akan menciptakan interaksi yang lebih insentif juga dapat membangun kedekatan secara humanis. Untuk menciptakan pelayanan yang baik maka perlu adanya suatu objek maupun aktifitas yang dapat menimbulkan suatu interaksi secara subjektif antara individu dengan yang lain salah satunya adalah melalui transaksi dalam praktik ekonomi.

Pelayanan dalam sektor kepariwisataan harus ditingkatkan secara intensif, agar wisatawan dapat merasakan interaksi secara humanis dari pihak pariwisata, juga dapat memberikan ketenangan dalam menjalankan aktifitas wisata. Melalui pelayanan yang baik maka dapat meningkatkan kualitas dalam tata kelola pariwisata juga sebagai sarana promosi untuk memperkenalkan destinasi pariwisata, sebab hal tersebut dapat berdampak pada minat wisatawan untuk datang berkunjung kembali.

Berdasarkan penjelasan lebih lanjut terkait peran masyarakat lokal dalam pelayanan pariwisata, peneliti telah melakukan wawancara kepada beberapa responden mengenai proses pelayanan dalam lingkup pariwisata pantai toronipa. pernyataan yang disampaikan oleh **Bapak Bahnur** beliau mengatakan bahwa:

“Kami selalu mengupayakan agar para wisatawan nyaman ketika datang berkunjung di Pantai Toronipa ini, melalui pelayanan yang ramah. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, maka kami merespon dengan baik dan kami melayani sesuai dengan permintaan pengunjung dan kami arahkan mereka dari apa yang menjadi permintaan mereka”.

Pernyataan yang serupa juga di sampaikan oleh salah satu responden terkait pelayanan dalam aktifitas pariwisata, melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti atas nama **Bpk Rifqi** beliau mengatakan bahwa:

“Kami melayani wisatawan itu dengan sepenuh hati, karena melalui mereka sehingga kami dapat keuntungan dalam mengelola pariwisata ini, kepan kami tidak ramah sama pengunjung pasti otomatis konsumen kami juga sedikit begitu pula sebaliknya. Jadi kami selalu meningkatkan kualitas pelayanan agar wisatawan/pengunjung itu nyaman datang berwisata dipantai toronip ini”.

Selain dari pernyataan yang disampaikan oleh responden diatas, peneliti juga telah mewawancarai salah satu pengunjung/wisatawan terkait pelayanan dalam tata kelola pariwisata pantai toronipa, atas nama Wulandari ia menyatakan bahwa:

Sesuai dengan yang saya alami, untuk pelayanan disini itu (pantai toronipa) mungkin saya rasa sangat baik, masyarakat lokal nya khususnya pengelola pariwisata pantai toronipa ramah-ramah semua, cepat mereka respon kalau ada yang kami butuhkan. Kemudian juga apa yang disediakan disini cukup memadai bagi kami selaku wisatawan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, mengenai peran masyarakat lokal dalam system tata kelola pariwisata pantai toronipa terdapat juga pada aspek pelayanan. Pelayanan merupakan hal yang utama dalam segala aktifitas pekerjaan, oleh sebab itu, pelayanan dalam system tata kelola pariwisata pantai toronipa selalu dikembangkan oleh pengelola pariwisata yang merupakan kalangan dari masyarakat lokal setempat.

4.4. Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Pantai Toronipa Perspektif Maslahat

Maslahat adalah salah satu konsep penting dalam Hukum Islam (syariah) Islam. Secara etimologi, maslahat berarti kebaikan, manfaat, atau kepentingan. Secara terminologi, maslahat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan atau manfaat bagi manusia, baik secara individual maupun sosial. Maslahat juga adalah sebagai alat atau metoda dalam hukum Islam untuk menentukan suatu status hukum (Istimbat) antara hak atau bathil, sehingga melalui metode maslahat dapat menentukan solusi dari suatu objek masalah tertentu dengan status hukum yang jelas dan tidak samar-samar.

Menurut Imam Al-Gazali asal maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudharat (kerusakan), namun hakikat dari maslahat adalah maqasid as-syariah atau memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum). Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maslahat juga merupakan bagian dari metode penalaran (Ra'yi) dalam menentukan status hukum dalam Islam (Syariah). Oleh karena itu, konsep maslahat biasanya digunakan pada masalah-masalah tertentu, seiring dengan arus perkembangan zaman dan lebih dominan untuk mengatasi masalah-masalah kontemporer di zaman sekarang sampai mendapatkan kepastian terkait status hukum dalam melakukan suatu hal tertentu, apakah dapat memberikan manfaat yang baik atau buruk dan juga boleh dilakukan atau tidak. Dengan demikian, maslahat tidak boleh bertentangan dengan dalil Nash, sehingga menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai rujukan tertinggi dalam pengaplikasiannya.

Adapun dalil nash yang menyangkut tentang maslahat dan menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada Q.S Al-Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

نِ اَوْ وَالْعُدْ اِلَآئِمَّ عَلٰى عَاوُنُوآ ت وَلَا وَالتَّقْوٰى اَلْبِرِّ عَلٰى وَتَعَاوُنُوآ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.S. Al-Maidah ayat 2)

Di ayat lain juga mengeskan mengenai landasan dalam menentukan suatu maslahat yaitu terdapat pada Q.S. Al-Maidah Ayat 49 yang berbunyi

اَن اِحْكُمَّ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ وَاَحْذَرُ هُمْ اَن يَّفْتِنُوْكَ عَنْ بَعْ
مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْ
وَإِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah terhadap mereka, agar mereka tidak menyesatkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu". (Al-Maidah : 49)

Selain dalil yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai rujukan dalam penelitian ini, terdapat juga dali yang bersumber dari Hadits Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani yang berbunyi:

حَٰئِرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya : “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”.(HR. Ath-Thabrani)

Kemudian juga terdapat pada Hadits Nabi SAW yang riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على
النقل عن هذا الأصل

"Artinya: *Apa saja yang bermanfaat bagi manusia, maka itu adalah bagian dari agama (HR. Muslim)*".

Kemudian juga ada pendapat dari ijma ulama yang menjadi rujukan dalam konsep maslahat dalam Islam. Menurut Imam Asy Syaukani dalam kitab-Nya Fathul Kadir telah mengemukakan beberapa kaidah diantaranya adalah :

أن الأصل في الأشياء المخلوقة الإباحة حتى يقوم دليل يدل على
النقل عن هذا الأصل

Artinya: *"Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini"*

Selain dari pada itu, para ulama juga sepakat bahwa maslahat merupakan salah satu metode hukum Islam. Misalnya, Imam al-Ghazali mengatakan bahwa maslahat merupakan salah satu dalil syariah yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum Islam, selain al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma'a.

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَابِدُ قُدِّمَ
الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: *"Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan"*

Berdasarkan dalil di atas, dalam menentukan suatu hukum maka musti berhati-hati dan selalu berkerja sama dalam hal kebaikan sehingga dapat memberikan manfaat secara individu, sosial, maupun lingkungan sekitar. Oleh sebab itu maslahat, selalu berorientasi pada hal kebaikan dan manfaat sehingga dalam penelitian, peneliti mengambil salah satu objek masalah dengan menganalisis dan meninjau segi maslahat nya. Dengan demikian, peneliti

mengambil permasalahan mengenai Peran Masyarakat Lokal Dalam meningkatkan System Tata Kelola Pariwisata Pantai Toronipa kemudian peneliti akan menganalisis dan meninjau masalah yang terkandung dalam penelitian tersebut.

Di dalam konsep masalah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yang mampu mendorong adanya kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia yaitu adalah sebagai berikut:

1. Masalah daruriyyah (masalah yang bersifat pokok atau mendesak)

Masalah daruriyyah adalah masalah yang harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kemudaratan yang besar bagi umat manusia. Masalah daruriyyah juga merupakan masalah yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka dapat membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Contoh dari masalah daruriyyah adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan hasil tinjauan dari peneliti mengenai peran masyarakat lokal dalam pengembangan tata kelola pariwisata pantai dalam perspektif masalah yang dapat ditemukan dari segi daruriyyah yaitu bahwa, dalam aktifitas tata kelola yang dijalankan oleh masyarakat lokal untuk menciptakan nuansa yang humanis dalam bermuamalah. Sehingga dalam menjalankan aktifitas tersebut masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan tuntunan dalam syariat Islam.

Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup secara primer maka, kebutuhan lainnya juga dapat dilengkapi dan disempurnakan melalui mata pencaharian yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi tata kelola pariwisata pantai toronipa. Masyarakat lokal juga tidak sepenuhnya menggantungkan harapan hidup pada

aspek pengelolaan pariwisata yang ada, tetapi dengan adanya potensi pariwisata tersebut setidaknya dapat menghasilkan rezeki yang halal sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup secara individu maupun rumah tangga dan juga mampu menghantarkan anak-anak mereka untuk menempuh pendidikan yang layak sesuai dengan prinsip dan tujuan dari masalah itu sendiri, yaitu untuk memelihara akal, harta, jiwa, keturunan dan Agama.

2. Masalahat hajiyyah (masalahat yang bersifat kebutuhan)

Maslahat hajiyyah adalah masalahat yang perlu dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi akan menimbulkan kesulitan atau ketidaknyamanan bagi umat manusia. Masalahat hajiyyah juga merupakan kebutuhan yang sangat sentral dalam keberlangsungan hidup manusia, biasa juga disebut sebagai pemenuhan kebutuhan hidup secara primer dan sekunder, Contoh masalahat hajiyyah adalah kemudahan dalam beribadah, pemenuhan kebutuhan hidup, dan keamanan.

Dalam aktifitas tata kelola pariwisata pantai toronipa dapat kita jumpai adanya interaksi sosial yang mampu mendorong adanya transformasi sosial secara inklusif. Interaksi tersebut bukan cuman sekedar bertatap muka, melainkan berjalanya suatu sisytem tata kelola pariwisata dengan aktifitas muamalah yang saling menguntungkan satu sama lain antara masyarakat lokal dengan para wisatawan. Tentu, dengan berjalanya aktifitas muamalah tersebut dapat menjalin adanya kebutuhan hidup masyarakat lokal dan kebutuhan wisatawan yang saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat lokal melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup secara primer dan sekunder, Sementara pihak wisatawan dapat memenuhi kebutuhan tersier yang dapat menumbukan rasa kebahagiaan dalam melakukan aktifitas wisata.

Sesuai dengan apa yang telah diamati oleh peneliti bahwa, mengenai peran masyarakat lokal dalam pengembangan tata kelola pariwisata pantai toronipa, terdapat banyak aktifitas yang mampu mendorong masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan hidup secara primer dan sekunder. Dengan beberapa aspek yang dilakukan dengan mengelola potensi pariwisata untuk menghasilkan upah dengan cara berjual beli dan melakukan sewa-menyewa kepada para wisatawan sehingga melalui hasil dari aktifitas tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara primer maupun sekunder.

3. Maslahat tahsiniyyah (maslahat yang bersifat kesempurnaan)

Maslahat tahsiniyyah adalah maslahat yang bersifat kesempurnaan, tetapi tidak wajib dipenuhi. Maslahat tahsiniyyah juga biasa dikatakan sebagai pemenuhan kebutuhan secara tersier yang dimana kebutuhan tersebut tidak terlalu vital jika tidak terpenuhi, namun patut untuk di jaga dan dilestarikan agar selalu memberikan nilai keindahan, Contoh dari maslahat tahsiniyyah adalah keindahan, ketertiban, dan kenyamanan.

Dalam menjalankan aktifitas tata kelola pariwisata pantai toronipa, pihak wisatawan dan masyarakat lokal setempat saling melengkapi satu sama lain. Dengan tujuan untuk memelihara dan memanfaatkan potensi alamiah agar tetap lestari keindahannya dan juga dapat memberikan kenyamanan hidup dengan menikmati adanya keindahan alam yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT tuhan semesta alam. Dengan terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan secara tersier maka tentu, hal tersebut juga dapat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder masyarakat lokal setempat dengan selalu bersama-sama memelihara agar tetap lestari dan terjaga keindahannya.

Sesuai apa yang telah diamatai oleh peneliti dilapangan, terkait peran masyarakat lokal dalam pengembangan tata kelola pariwisata pantai toronipa, dapat memberikan nilai maslahat secara tahsiniyah kepada masyarakat lokal setempat dan para wisatawan agar selalu memelihara keindahan alam dan kenyamanan dalam lingkungan sekitar melalui aktifitas pariwisata. Oleh sebab itu, peran masyarakat lokal sangatlah inklusif dalam proses tata kelola pariwisata sehingga mampu memberikan nuansa yang sangat positif kepada para wistawan dan juga kondisi lingkungan dalam kawasan pariwisata pantai Toronipa.

Selain dari pada itu, berdasarkan hasil analisis dan riset yang dilakukan oleh peneliti terkait peran masyarakat lokal dalam pengembangan tata kelola pariwisata perspektif maslahat yaitu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam syariat Islam dan memiliki nilai maslahat yang positif terhadap masyarakat lokal dan lingkungan sekitar, dengan demikian pemerintah setempat harus tetap mengakomodir jalanya sytem tata kelola pariwisata tersebut agar tetap stabil dan kondusif sehingga dapat menangkal adanya potensi kemudhratan yang akan terjadi dalam menjalankanya.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada bapak **Sattir** mengenai maslahat yang diberikan terhadap masyarakat lokal di kelurahan Toronipa dengan adanya Pariwista Pantai toronipa, beliau mengatakan bahwa:

“mungkin menurut saya, maslahat yang didapatkan disini itu sangat banyak bagi masyarakat lokal termasuk saya juag dan untuk wisatawan. Diantaranya yaitu, kalau untuk masyarakat lokal bisa bisa mengelola dan memanfaatkan potensi pariwisata ini dari segi ekonomis seperti bisa berjualan, bisa menyewakan sarana yang dibutuhkan oleh wistawan dan termasuk juga tarif biaya masuk pantai. Itu natabenanya masyarakat lokal disini yang jalankan itu, kemudian hasilnya itu kita kumpul kemudian kita bagi sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati. Selain daripada itu juga, dengan adanya pariwisata disini, pemerintah lebih memperhatikan adanya pembangunan disisini untuk akses pariwisata, kemudian juga mendorong masyarakat lokal dan para wisatawan untuk selalu memelihara

kebersihan lingkungan sebab, mereka sadari bahwa ini adalah kawasan pariwisata jadi, ada mendset dipikiran setiap orang yang berkunjung disini bahwa yang utama dalam wisata itu adalah kenyamanan dan kenyamanan itu tercipta dari lingkungan yang bersih, asrih dan udarah yang sehat. Jadi, kita harus sadari bahwa pariwisata ini itu merupakan karunia dari Tuhan jadi, mari sama-sama kita menjaga dan melestarikanya, jangan sampai rusak karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Selain dari pernyataan yang disampaikan oleh responden diatas, peneliti juga telah mewawancari salah satu wisatawan sebagai tesponden atas nama **Zulkifli**, ia mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan apa yang saya saksikan langsung, maslahat/manfaat yang didapatkan disini itu mungkin cukup cukup memadai, kalau saya sebagai wisatawan yang saya dapatkan itu ketika berkunjung disini yaitu ketenangan karena tujuan saya untuk wisata yaitu untuk menenangkan jiwa, selain dari itu juga saya bisa membantu masyarakat lokal disini untuk meningkatkan pendapatan yang menjadi kebutuhan mereka, sebab kalau wistawan sunyi pasti masyarakat lokal yang berjualan disini pendapatanya juga berkurang, karena harapan mereka untuk melakukan itu, melihat dari kondisi wisatawan yang berkunjung kesini, dari situlah sumber pendapatan mereka”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat merumuskan dan mengklasifikasikan dari beberapa dampak dan maslahat yang didapatkan oleh masyarakat lokal terhadap pengembangan sytem tata kelola pariwisata pantai toronipa diantaranya yaitu:

1. Aktivitas Muamalah

Secara umum, Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial yang sesuai dengan syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh Syariat tersebut, yang terdiri dari hak dan kewajiban. Lebih jauh lagi interaksi antara manusia tersebut akan membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Dalam arti luas muamalah merupakan aturan Allah untuk manusia untuk bergaul dengan manusia

lainnya dalam berinteraksi. Sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda (Habdu minannas).

Selain dari pada itu, muamalah juga mempunyai banyak cabang, diantaranya muamalah politik, ekonomi, dan sosial. Secara umum muamalah mencakup dua aspek, yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Aspek adabiyah yakni kegiatan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak, contohnya menghargai sesama, kejujuran, saling meridhoi, kesopanan, dan sebagainya. Sedangkan aspek madaniyah adalah aspek yang berhubungan dengan kebendaan, seperti halal haram, syubhat, kemudharatan, dan lainnya.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, sangat korelatif dengan masalah yang menjadi obojek dalam penelitian ini. Mengenai peran masyarakat lokal dalam pengembangan system tata kelola pariwisata pantai toronipa perspektif maslahat. Dngn adanya aktifitas tersebut telah membentuk hubungan Muamalah yang sangat signifikan di dalam kawasan Pariwisata Pantai Toroniap, sehingga hal tersebut dapat menciptakan nuansa humanis yang bisa mempererat rasa persaudaraan sesama manusia (Ukhuwa Insania) juga dapat saling membutuhkan satu sama lain antara wisatawan dan masyarakat lokal setempat.

2. Mendorong adanya pembangunan daerah

Maslahat yang ke dua yaitu, dengan adanya perhatian dari pemerintah serta masyaraka lokal setempat untuk lebih memperhatikan adanya pembagunan daerah. Agar, dengan adanya pembangunan daerah dapat menjadi ikon tertentu untuk daerah tersebut sehingga dapat dikenal oleh banyak kalangan wisatawan dan juga

dapat mempermudah akses bagi wisatawan yang ingin datang berkunjung di kawasan pariwisata pantai toronipa.

Dengan adanya potensi sumber daya alam disuatu daerah dapat dimanfaatkan sebagai aset pendapatan untuk daerah tersebut. Salah satu diantaranya adalah sumber daya pariwisata, pariwisata dapat dikelola sebagai sumber pendapatan yang mempuni jika sytem pengelolaanya itu baik. Dalam pengelolaanya juga harus memperhatikan beberapa dampak yang menjadi implikasi dalam menjalankanya. Tentu hal yang paling uatama dalam pelaksanaan itu adalah manfaat bagi masyarakat sosial dan lingkungan sekitar sehingga dapat meminimalisir adanya ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan.

Untuk mendorong adanya pengembangan pariwisata pantai toronipa, maka hal yang paling fundamental adalah akses infrastruktur yang dapat mempermudah wisatawan untuk menempuh lokasi pariwisata. Dengan adanya infrastruktur yang memadai maka kunjungan wisatawan di kawasan pariwisata tersebut juga akan padat, selain dari pembangunan infrastruktur sebagai akses, maka yang diperlukan selanjutnya adalah pengadaan sarana yang bertujuan untuk mendorong adanya pengembangan dan pertumbuhan ekonomi yang diperuntukan untuk masyarakat lokal setempat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembanguan daera melalui pungutan pajak yangtelah ditentukan oleh pemerintah setempat.

3. Pemeliharaan Lingkungan

Maslahat yang ke tiga yaitu, masyarakat lokal dan para wisatawan cenderung untuk selalu memperhatikan dan peduli terhadap kondisi kebersiha lingkungan sekitar di sepanjang kawasan pariwisata pantai toronipa. hal ini dilakukan atas kesadaran secara individu terhadap kondisi lingkungan, sebab

kebersihan lingkungan merupakan hal yang paling utama dan vital dalam sektor kepariwisataan sehingga dengan lingkungan yang bersih, mampu mendorong wisatawan untuk datang berkunjung di tempat tersebut.

Sesuai dengan yang diamati oleh peneliti dilapangan, masyarakat lokal sangat rutin membersihkan lingkungan disepanjang kawasan pariwisata pantai toronipa, bahkan ada juga beberapa komunitas relawan maupun aktvis lingkungan yang turut serta dan berbondong-bondong dalam membantu menjaga kebersihan lingkungan, mereka sangat antusias untuk memberikan edukasi kepada setiap wisatawan yang datang berkunjung dipantai toronipa untuk tetap sadar dan peduli terhadap kondisi kebersihan lingkungan agar tetap terjaga dan dilestarikan.

Kesadaran dan kepedulian atas kondisi kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama setiap individu dimanapun kita berada. Sebab, alam merupakan anugerah dari Allah SWT. Sebagai ekosistem seluruh mahluk hidup dimuka bumi ini. Maka dari itu, manusia sebagai insan yang menyandang status sebagai khalifatu Al-Ardh (Khalifah dimuka Bumi) memiliki peran sentral dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar dengan tidak membuat kedzhaliman atau kerusakan dimuka bumi sesuai dengan tujuan kekhilafaan manusia sebagai insan yang “Rahmatan Lil Alamiin” yaitu rahmat bagi seluruh alam.